

# **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SHARIAH PADA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN PIDIE JAYA**

**Rizki Ramadhana**

Uin Sumatera Utara

rizki.ramadhana18021995@gmail.com

**Muhammad Syukri Albani Nasution**

Uin Sumatera Utara

muhammadsyukrialbani@uinsu.ac.id

**Maryam Batubara**

Uin Sumatera Utara

maryam.batubara@uinsu.ac.id

## ***Abstrak***

*Objective: To find out budget management at the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service. To find out the accountability model for budget management at the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service. This research is research using a descriptive qualitative approach using a case study approach. In this research, documentary studies, interviews and observations were used. Overall, budget management at the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service has been well managed through the principles of planning, organizing, implementing and controlling which involves all parties related to the programs budgeted by the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service. Every time you prepare a work program, the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service always involves the community in determining what programs will be carried out by the agency. The budget accountability model at the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service focuses on the output and outcomes obtained, starting from input in the form of evidence of financial transactions and documentation of activities which are then processed to prepare accountability reports. The accountability process is carried out by compiling, classifying, summarizing and presenting evidence of transactions which are input into the description of the accountability report. The resulting output is a prepared Accountability Report, and the resulting outcome is the performance of budget implementation in accordance with what was allocated and the trust of stakeholders. However, in practice, sometimes there are problems with delays in reporting accountability due to incomplete documents from other sectors or stakeholders. In general, budget accountability carried out by the Pidie Jaya Regency Islamic Sharia Service has fulfilled the five objectives in the maqashid sharia concept, namely hifdz ad-din, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-mal, and hifdz an-nasb. However, the Islamic Sharia Service needs to carry out evaluations as future improvements in allocating budgets to programs or activities that have more urgency than other activity programs.*

**Keywords:** *Accountability, Budget, Maqashid Shariah Perspective*

### **Abstrak**

*Tujuan Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan studi dokumenter, wawancara, observasi. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah terkelola dengan baik melalui prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Setiap melakukan penyusunan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya selalu mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan program apa saja yang akan dilakukan oleh instansi. Model akuntabilitas anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya berfokus pada output dan outcome yang diperoleh, dimulai dari input yang berupa bukti-bukti transaksi keuangan maupun dokumentasi kegiatan yang selanjutnya diproses untuk menyusun laporan akuntabilitas. Proses akuntabilitas yang dilakukan dengan menyusun, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan menyajikan bukti-bukti transaksi yang menjadi input dalam uraian laporan akuntabilitas. Output yang dihasilkan adalah Laporan Akuntabilitas yang disusun, dan Outcome yang dihasilkan adalah kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang dialokasikan dan kepercayaan para stakeholder. Namun pada praktiknya terkadang terdapat kendala pada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban karena adanya dokumen yang tidak lengkap dari bidang-bidang atau dari para stakeholder yang lain. Secara umum akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi lima tujuan dalam konsep maqashid syariah yaitu hifdz ad-din, hifdz an-nas, hifdz al-aql, hifdz al-mal, dan hifdz an-nasb. Hanya saja, Dinas Syariat Islam perlu melakukan evaluasi sebagai perbaikan ke depan dalam pengalokasian anggaran pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai urgensi lebih dibanding dengan program kegiatan lainnya.*

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Anggaran, Perspektif Maqashid Shariah

#### **A. PENDAHULUAN**

Adapun penganggaran yang berbasis kinerja akan mengacu terhadap proses pendayagunaan dana yang tersedia oleh pihak pimpinan guna mengoptimalkan hasil yang akan dikehendaki melalui kegiatan yang dijalankan. Dalam menunjang akuntabilitas dan transparansi anggaran, diperlukan upaya penentuan skala prioritas yang dimungkinkan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sebelumnya juga sudah ditentukan. Dalam pelaksanaannya pengelolaan anggaran dalam lingkup pemerintahan daerah tetap membutuhkan proses pengawasan dan pembinaan pada instansi-instansinya sehingga dapat akan lebih lagi tingkat akuntabilitas dalam mengelola anggaran sekaligus memungkinkan untuk dapat mencapai *good local government*<sup>1</sup>

Terwujudnya *Good Governance* adalah persyaratan untuk pemerintah dalam menghasilkan aspirasi dan mewujudkan tujuan berikut cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dibutuhkan pengembangan ataupun penetapan sistem dengan tanggung jawab yang sejelas, setepat dan seterukur mungkin, agar pemerintahan

---

<sup>1</sup> M. Nafarin., *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

berikut pengelolaan anggaran dimungkinkan penyelenggaraannya secara lebih efektif, efisien, bersih akuntabel, dan terbebas atas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>2</sup>

Akuntabilitas publik adalah hak dari setiap warga Negara Indonesia yang harus pemerintah pusat dan daerah dapat penuhi agar publik mendapatkan informasi yang relevan berkenaan dengan pengelolaan keuangan publik. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban menyusun laporan keuangan selaku pengelola keuangan Negara atau daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>3</sup> Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dituntut kepada Pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk *responsibility* dalam pengelolaan keuangannya Penyajian laporan keuangan ini adalah salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi pemerintah.<sup>4</sup>

Akuntabilitas publik merupakan penyampaian informasi atau *disclosure* atas kinerja dan kegiatan pemerintah daerah untuk *stakeholder* (yang berkepentingan). Dari berbagai informasi terkait pengelolaan anggaran daerah yang ada bisa dijadikan sebagai bahan pengawasan kinerja keuangan pemerintah oleh masyarakat. Selain itu untuk para pengambil keputusan dalam memenuhi tuntutan masyarakat dapat menggunakannya sebagai evaluasi kinerja organisasi. Peningkatan informasi dan pelayanan yang diberikan terhadap organisasi sektor publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terkait dengan penentuan keputusan kebijakan publik.<sup>5</sup>

Penerapan akuntabilitas publik di Indonesia tidak merupakan sesuatu yang baru dan sebaiknya dilakukan secara utuh dalam lingkup pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat akan akuntabilitas publik khususnya dalam konsep pengelolaan anggaran pemerintah disebabkan karena banyaknya penyelewengan dana dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai atau pejabat pemerintah.<sup>6</sup> Adapun yang juga termasuk sebagai alasan lemahnya birokrasi sekaligus penyebab adanya bermacam penyimpangan administrasi dan pengelolaan keuangan adalah pemerintah yang tidak mampu menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di segala lini. Penerapan prinsip akuntabilitas bisa didasarkan atas wujud pertanggungjawaban yang terbuka pada setiap pihak yang turut terlibat di dalamnya.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup> Santrio Kamaluddin, 'Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang', *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3.1 (2019), 222–28 <<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnal/fisip/article/view/490>>.

<sup>3</sup> Inge Agnesia, M Ridwan, and Maryam Batubara, 'BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING', 6.1, 17–26.

<sup>4</sup> Arif Rivan and Maksun I, 'Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management', *Public Administration Journal*, 9.2 (2019), 92–100 <<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>.

<sup>5</sup> H Sofyani, UNNA Ali, and D Septiari, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *JIA (Jurnal Ilmiah ...)*, 5.2 (2020), 325–59.

<sup>6</sup> Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1.1 (2018), 16–28 <<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>>.

<sup>7</sup> Desak Made Indah Paramitha Sari, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar', *Jurnal Akuntansi*, 11.1 (2022), 103–17 <<https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>>.

Akuntabilitas publik memiliki peranan penting menyangkut kelangsungan dan ketahanan dalam suatu Negara. Pernyataan ini tidak berlebihan karena akuntabilitas adalah syarat agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pemerintahan yang baik dari segi tata kelola pemerintahan terpenuhi.<sup>8</sup> Akuntabilitas adalah alat atau media pengawasan masyarakat atas pemerintah ketika menggunakan dana masyarakat, sehingga agar dana tersebut menjadi lebih baik penggunaannya dan mencegah kecurangan ataupun korupsi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola anggaran masyarakat. Hal ini berarti krusial untuk pemerintah agar dapat menyajikan laporan keuangan untuk memenuhi wujud akuntabilitas dan transparansi. Di sisi lain, perlu adanya sebuah sistem pertanggungjawaban secara lebih jelas hingga kemudian penganggarannya dapat lebih efisien, efektif, serta tepat sasaran. Penelitian dari Melo menunjukkan bahwa akuntabilitas dan kepemimpinan merupakan solusi terbaik dalam praktiknya untuk menyediakan organisasi yang efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Dari pemikiran tersebut, berbagai usaha telah dilaksanakan pemerintah demi peningkatan akuntabilitas publik di Indonesia, termasuk melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa setiap laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian hasilnya akan dipublikasikan kepada masyarakat. Akan tetapi, hasil pemeriksaannya bukan merupakan jaminan atas pengelolaan anggaran yang maksimal dan bersih. Fakta yang terungkap hari ini menunjukkan bahwa sektor publik acap kali menjadi ladang pemborosan, inefisiensi, sekaligus sebagai sumber kebocoran keuangan.<sup>10</sup>

Dijelaskan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai sebuah opini audit paling tinggi yang dapat disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan pengelolaan anggaran pada sebuah Lembaga atau Kementerian. Kendati demikian, WTP bukanlah sebuah jaminan bersihnya Lembaga terkait atas kemungkinan adanya kasus suap atau korupsi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris Jendral BPK RI Bahtiar Arif ketika rapat dengan Komisi XI DPR RI (25/08/2022) bahwa opini laporan keuangan merupakan opini kewajaran atas sebuah laporan keuangan, tak dapat menjadi jaminan atas kemungkinan adanya korupsi, apalagi suap. Maka meskipun Kabupaten Pidie Jaya selama beberapa tahun terakhir meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian tidak menjadi jaminan bersih dari inefisiensi dalam pengelolaan dana publik. Permasalahan ini menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas publik tidak hanya di Pidie Jaya namun juga di Indonesia (pidiejayakab.go.id, 2023).

Berbagai permasalahan terkait penganggaran ini merupakan akibat dari pelaksanaan pengawasan dan sistem kontrol yang sedemikian lemah. Maka pemerintah kemudian mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) demi terintegrasinya manajemen kinerja berikut manajemen keuangan

---

<sup>8</sup> Hariyadi Hariyadi, 'BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) BERBASIS KINERJA (Studi Empiris Di SMK Negeri Se-Kota Madiun)', *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4.1 (2015), 1 <<https://doi.org/10.25273/jap.v4i1.669>>.

<sup>9</sup> P N Melo, A Martins, and M Pereira, 'The Relationship Between Leadership and Accountability: A Review and Synthesis of the Research', *Journal of Entrepreneurship Education*, 23.6 (2020).

<sup>10</sup> Sayuti, Majid, and Juardi.

(Anggaran Berbasis Kinerja) sekaligus menunjang untuk dilakukannya pengawasan dan pengendalian.<sup>11</sup>

Selain itu, akuntabilitas publik juga dapat berguna dan diperlukan untuk dapat mereduksi aktivitas kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan, hingga kegiatan korupsi, dan pemborosan anggaran. Implementasi sebuah konsep pertanggungjawaban haruslah dapat dilandasi kesadaran dari setiap pribadi yang mendapati keterlibatan di dalamnya.<sup>12</sup>

Kemudian yang termasuk sebagai parameter keberhasilan dari akuntabilitas yaitu dengan menggunakan konsep *maqashid syariah*, yang menerangkan bahwa dalam setiap hukum Allah ada tujuan syariah di dalamnya. Adapun *maqashid Syariah* ini merupakan keseluruhan dari produk islam yang meminimalisir kemudharatan dan mendorong kemaslahatan umat. Terdapat lima jenis parameter *Maqashid Syariah* yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifdz Ad-Din*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz An-Nafs*), perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz An-Nasl*), perlindungan terhadap harta (*Hifdz Al-Mal*) dan perlindungan terhadap akal (*Hifdz Al-Aql*).<sup>13</sup> Penelitian dari Nabilah, dkk menunjukkan pengelolaan dana dalam program jaminan kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota belum sesuai dengan *maqashid syari'ah*.<sup>14</sup> Kemudian, Penelitian dari Hakimi menunjukkan bahwa Pemerintah Afghanistan gagal mengimplementasikan *maqashid syariah* yang mengakibatkan tidak terlindunginya fasilitas publik dan akan menjadi tantangan besar selama dua dekade ke depan.<sup>15</sup>

Dinas Syariat Islam merupakan salah satu Satuan Kinerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Pidie Jaya dengan visi mewujudkan Pidie Jaya yang Islami (Pidiejayakab.go.id). Para pelaku ekonomi islam seharusnya menggunakan *Maqashid Syariah* untuk dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi dan menjadi pedoman yang akurat khususnya pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini disebabkan Dinas Syariat Islam mempunyai dimensi spiritual dengan prinsip masalah. Hal ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja organisasi menjadi lebih baik, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dana pada pelaksanaan suatu kegiatan yang mengganggu kinerja organisasi, sehingga *Maqashid Syariah* diharapkan menjadi indikator analisis untuk mengatasi masalah yang bisa meningkatkan efisiensi perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana anggaran yang ada di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Alasan lain yang mendasarinya adalah Konsep Indeks *Maqashid Syariah*

---

<sup>11</sup> Dendy Syaiful Akbar and Ruhayat, 'Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah', *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3.2 (2016), 93–106.

<sup>12</sup> Nengsi Oktavia Makalew, Paulus Kombo Allo Layuk, and Ida Ayu Purba Riani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja Berbasis Kinerja Di Pemerintah Provinsi Papua Barat', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 6.1 (2021), 1–9  
<<https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1666>>.

<sup>13</sup> Marlia Asmarani and Rohmawati Kusumaningtiyas, 'AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH : STUDI PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt', *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8.1 (2019).

<sup>14</sup> M. Syaiful Padli, Nur Diana, and Afifudin, 'Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Bank Syariah Di Indonesia', *E-Jra*, 07.10 (2019), 119–31.

<sup>15</sup> A. R. Hakimi, 'Accountability Of The Afghan Government From Maqasid Perspective: Five Necessities Of Human Survival', *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1 (2022), 53–55.

yang berorientasi dalam: *Tahzibul Fardi* (Mendidik Individu), *Iqamah al Adl* (Menegakkan keadilan), *Maslahah* (Kepentingan publik).<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Syariat Islam selama periode 2023–2026, bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan program ialah memadainya anggaran yang tersedia untuk menjalankan syariat islam, khususnya untuk dapat mendorong kapasitas aparat yang berwenang dalam menegakkan hukum syariat Islam, penyelenggaraan pengajian, kajian, dakwah/ penyuluhan islam ataupun pemahaman atas kandungan Al Quran, pembelajaran islam berikut upaya peningkatannya, termasuk dalam hal ibadah. Kendati pada praktiknya tentu didapati berbagai macam keterbatasan anggaran dalam kegiatan strategis berikut prioritas perwujudannya. Hingga kemudian, seringkali dibutuhkan adanya penyesuaian anggaran dalam setiap perencanaan kegiatannya, yang kemudian berakibat pada tidak optimalnya capaian atas kinerja. Dari Rencana Kerja Anggaran yang disusun oleh Dinas Syariat Islam berdasarkan usulan dari masyarakat daerah dan perwujudan program instansi, dalam pelaksanaannya tidak teranggarkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan perbandingan Rencana Kerja Anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.1 Perbandingan Rencana Kerja Anggaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam

<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>RKA (Rp)</b>	<b>DPA (Rp)</b>	<b>%</b>
Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	539.000.000	279.000.000	52%
Ceramah Bulan Suci Ramadhan	98.300.000	53.400.000	54%
Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	3.540.000.000	2.489.600.000	70%
Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	593.560.000	150.000.000	25%
Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	1.792.500.000	1.732.500.000	97%
Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	198.000.000	88.000.000	44%
Pembinaan Keluarga Islami	39.170.000	15.000.000	38%
Pelaksanaan MTQ	1.988.058.000	1.101.636.300	55%
Penyebaran Informasi Keislaman	15.000.000	17.300.000	115%
Peningkatan Pembangunan Sarpras Agama	6.329.300.000	9.373.681.492	148%
Penyelenggaraan Hari Besar Islam	465.890.000	364.900.000	78%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.780.865.000	2.123.470.996	118%

Sumber : Data diolah dari Rencana Kerja Anggaran Dinas Syariat Islam

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Rencana Kinerja Anggaran (RKA) yang disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masih tidak maksimal. Seperti anggaran untuk Penyelenggaraan Pengajian di Gampong yang hanya disetujui 52% dari Rencana Kerja Anggaran. Sedangkan untuk Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama melebihi 48% dari yang diproyeksikan.

Sementara itu, penyelenggaraan Indeks Pembangunan Syariah di Aceh didasarkan atas UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, kemudian UU No. 11 Tahun 20016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), berikut implementasi atas

<sup>16</sup> Pirngadi and others, 'Pengaruh Kompensasi , Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja Dan Perspektif Maqashid Syariah Pada', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.03 (2022), 2995–3002.

Qanun No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah Islam. Adapun kegunaan dari adanya Indeks pembangunan Syariah yaitu sebagai pengukuran atas tingkat keberhasilan ataupun perkembangan dari implementasi syariah Islam berdasarkan tingkat kesesuaiannya terhadap ketentuan *maqasid syariah* (indikator dan kriteria indeks Pembangunan Syariah).

IPS diukur dalam hal ini berdasarkan sejumlah tujuh dimensi implementasi Syariah Islam yang merujuk Qanun No, 8 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Syariah Islam, yang antara lain adalah beberapa dimensi berikut; Aqidah, Akhlak/Moral, Manajemen Masjid, Hukum Jinayah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta Zakat dan Dimensi Melek Qur'an. Adapun secara keseluruhannya turut termuat dalam Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2022 Dinas Syariah Islam untuk mendapati pengembangannya dalam sejumlah lima pilar *maqashid syariah*, yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keluarga dan harta, dengan tujuan sebagai pengukuran atas tingkat ketercapaian implementasi syariah Islam di Aceh, agar tercipta kemaslahatan umat, baik di dunia maupun akhirat.

Tabel 1.2 Indeks Pembangunan Syariah pada Dinas Syariah Islam

	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	
		Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Syariah Islam	83%	81,84 %

(Sumber : Laporan Kinerja Dinas Syariah Islam 2022)

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Indeks Pembangunan Syariah pada Dinas Syariah Islam belum mencapai target yang direncanakan sebesar 83%, dimana realisasi yang dicapai hanya 81,84%.

Bahasan mengenai *Maqashid Syariah* kemudian dalam pengembangannya mendapati sejumlah tiga tokohnya, yakni Imam al-Haramayn Abu al-Ma'ali Abd Allah al-Juwayni (w. 478 H), Abu Ishaq al-Syathibi (w.790 H) dan Muhammad al-Thahir ibn Asyur (w. 1379 H/1873 M). kendati tentunya, kemunculan tiga tokoh tersebut bukan untuk menyingkirkan peran yang sebelumnya didapuk oleh Abu Bakr al-Qaffal al-Shashi, al-Ghazali, al-Amiri, ataupun banyak ulama lain yang tak kalah besar perannya untuk mengonsepskan *Maqashid Syariah*. Ketiga tokoh utama tersebut pada umumnya mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* menjadi tiga tingkatan, yang terdiri dari kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyyat* (sekunder), serta *tahsiniyah* (tersier).<sup>17</sup>

Di sisi lain dalam penerapannya, program-program prioritas (*dharuriyat*) Dinas Syariah Islam seperti penyelenggaraan pengajian di gampong, peningkatan pemahaman wawasan islam, pembinaan kelembagaan Tilawatil Qur'an, pembinaan keluarga Islami, dan penyelenggaraan ibadah haji daerah, belum mendapat anggaran yang maksimal bahkan mendapat persentase anggaran yang lebih kecil dari sasaran yang tidak menjadi prioritas utama (*hajiyyat, tahsiniyyat*). Hal ini tentunya bertentangan dengan konsep teoritis *maqashid syariah* yang telah disampaikan sebelumnya terbagi dalam tiga tingkatan, yang terdiri dari *dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyat* sebagaimana disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Sasaran Prioritas Kegiatan berdasarkan *maqashid syariah*

<sup>17</sup> Mohammad Iqbal Bagus Ramadhan, Ahim Abdurahim, and Hafiez Sofyani, 'Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6.1 (2018), 5–18.

Dinas Syariat Islam Pidie Jaya

Sasaran Prioritas	Nama Kegiatan	Persentase Alokasi Anggaran
Dharuriyyat	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	1,6 %
	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam	14 %
	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	0,8 %
	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	0,5 %
	Penyediaan, Pendistribusian, dan Pengawasan Sarana Peribadatan	9,7 %
	Pembinaan Keluarga Islami	0,1 %
Hajiyyat	Pelaksanaan MTQ	0,1 %
	Penyebaran Informasi Keislaman	6,2 %
	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan	52,7 %
	Penyelenggaraan Hari Besar Islam	2,1 %
Tahsiniyyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,9 %

(Sumber : data diolah dari DPA Dinas Syariat Islam Pidie Jaya)

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menjelaskan, mendeskripsikan atau menggambarkan secara kritis dan realistis fenomena yang sedang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan makna dalam konteks yang sebenarnya<sup>18</sup>.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang difokuskan pada topik penelitian tertentu, dimana hasil penelitian dibatasi pada topik penelitian. Tujuan penelitian Untuk mengetahui pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mengetahui model akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran yang akuntabel dalam perspektif *maqashid sharia* pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini digunakan studi dokumenter, wawancara, observasi sebagai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk memperoleh data<sup>19</sup>. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-interaktif yang terdiri dari tiga aliran kegiatan yang berjalan secara bersamaan yaitu; Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

<sup>18</sup> Aisyah Sayuti, Husaenie & Hidayati, 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat', *Jurnal RESIPROKAL*, 2.2 (2020).

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017).



## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Anggaran adalah suatu perencanaan terorganisir dan sistematis dan telah disusun yang meliputi semua program/aktivitas dalam bentuk angka yang akan dilakukan oleh instansi dimasa yang akan datang untuk jangka waktu tertentu. Terkait anggaran organisasi pada sektor publik, di dalamnya akan turut meliputi serangkaian rencana mengenai besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana, berikut upaya perolehan pembiayaan tersebut. Terlebih anggaran tidaklah suatu proses yang dapat berdiri sendiri, melainkan melalui berbagai pertimbangan dari kebijakan pemerintah. Terkait dengan proses penganggaran yang baik tentu akan ditunjang hingga ketika saatnya juga akan menunjang bermacam pilar pemerintahan publik modern, yaitu: integritas, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan dan pendekatan strategis agar perencanaannya dapat mencapai tujuan secara nasional. Selain itu, penganggaran tersebut juga turut menjadi kunci penting pada proses arsitektur kepercayaan yang dibentuk negara dengan warga negara ketika mengelola anggaran Oleh karena itu, penting artinya untuk instansi dalam mendorong pembentukan suatu pola penganggaran secara efektif melalui pelibatan elemen terkait secara keseluruhan. Pada hakikatnya, terdapat sejumlah empat poin dalam penganggaran yang dimaksudkan, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta akan dijelaskan melalui uraian berikut:

#### a) Perencanaan

Terkait dengan anggaran yang baik, perencanaannya harus dapat meliputi kegiatan organisasi secara keseluruhan hingga kemudian akan mendorong jalannya fungsi anggaran dengan sebaik mungkin. Adapun perencanaan ini mencakup keseluruhan kegiatan organisasi tersebut dikenal dengan *comprehensive budgeting* yang terbagi dalam anggaran penaksiran, anggaran variable, analisis statistik, dan laporan anggaran. Dalam pelaksanaannya, pembuatan perencanaan anggaran dalam sebuah program organisasi cukup menghabiskan banyak waktu. Dalam pandangan umum, perencanaan anggaran hanya dilakukan dengan format sederhana sebagaimana terlampir dalam proposal program, yang isinya hanyalah serangkaian program berikut strategis yang sudah ditentukan. Kendati ketika menganalisis program berlangsung, peneliti akhirnya sadar bahwa anggaran merupakan komponen terpenting atas suatu program tertentu.

Dinas Syariat Islam merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berpotensi cukup strategis di Kabupaten Pidie Jaya, pastinya memerlukan anggaran yang tidak sedikit dengan kekhususan daerah Aceh yang menerapkan syariat Islam. Keadaan ini, kemudian menuntut pemda Pidie Jaya lewat Dinas Syariat Islam untuk dapat menyusun Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Pidie Jaya. Berdasarkan keadaan yang disampaikan, perencanaan anggaran bagi syariat Islam diharuskan dapat sejalan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya serta juga dilaksanakan sesuai sesuai regulasi yang sudah menjadi ketentuan Pemerintah Pusat, selain itu juga harus dapat berjalan dengan terstruktur, sesuai dengan temuan penelitian berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

*Pada DSI (Dinas Syariat Islam) awalnya penganggaran dimulai dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) di tingkat desa, kemudian berlanjut ke tingkat musrenbang kecamatan,*

*seterusnya musrenbang Kabupaten. Kemudian dari proses tersebut, Dinas Syariat Islam mengeluarkan Rencana Kerja Anggaran hingga akhirnya terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran. (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).*

Berdasarkan *statement* dari Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya dapat kita ketahui bahwa perencanaan anggaran tidak dilakukan secara statis dengan serta merta oleh Dinas Syariat Islam secara sepihak, namun perencanaan anggaran bersifat dinamis mulai dari tingkatan masyarakat desa bertahap hingga sampai ke tingkatan kabupaten. Sejalan dengan hal ini, juga relevan dengan pernyataan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya yang.

Pernyataan dari Kasubbag. Keuangan ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan anggaran yang bersifat dinamis yang disesuaikan dengan saran usulan dari kebutuhan masyarakat akan tetapi berjalan dengan proses verifikasi untuk kemudian dapat didiskusikan bersama dalam lingkungan birokrasi Kabupaten Pidie Jaya. Untuk memeriksa validitas dari informasi yang diberikan beberapa narasumber sebelumnya, mengenai perencanaan anggaran yang dilaksanakan Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya, Peneliti selanjutnya meminta konfirmasi kepada salah satu penerima Bantuan Sosial Keagamaan dari Dinas Syariat Islam.

Dari data di atas dapat diketahui berbagai program yang direncanakan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya berikut alokasi anggaran biayanya dalam mendukung program terkait. Adapun data ini menunjukkan kehendak dalam membangun sistem perencanaan anggaran yang berbasis program dengan pemduan perencanaan kinerja dan anggaran tahunan serta tampak keterikatan dari dana yang ada terhadap hasil yang diinginkan. Sistem pengelolaan anggaran yang demikian dikenal pula dengan sebutan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Perubahan sistem penganggaran berbasis kinerja menjadi faktor utama yang meningkatkan dan sekaligus mendorong kinerja Instansi Pemerintah serta menunjang pelaksanaan *good governance* yang menjadi prasyarat penting dalam pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa, terutama terhadap masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.

#### **b) Pengorganisasian**

Pengorganisasian adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengatur, penetapan, dan penggolongan apa saja kegiatan yang ada dalam suatu organisasi misalnya dengan penetapan wewenang ataupun tugas seseorang, dan pendelegasian guna mendorong tercapainya tujuan organisasi. Pengorganisasian juga sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sebagaimana sumber-sumber, tujuan, berikut kondisi lingkungannya. Sebagaimana perencanaan, pengorganisasian juga memiliki peran penting, karena dalam pengorganisasian seluruh sumber daya baik manusia, materi, maupun sumber daya yang lain harus dikelola sedemikian rupa untuk jalannya roda organisasi/instansi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Berkaitan hal ini, pengorganisasian anggaran di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya secara keseluruhan bisa disebut sudah berlangsung secara baik, sebab sudah ditetapkan, diatur dengan baik dan juga disajikan pada Masyarakat secara umum.

#### **c) Pelaksanaan**

Pelaksanaan anggaran adalah tahapan pengelolaan anggaran dengan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka implementasi kebijakan anggaran. Pada dasarnya anggaran yang disusun dengan baik dapat dilaksanakan dengan baik pula,

sebaliknya akan cukup mustahil pada anggaran dengan penyusunan yang buruk bisa dilaksanakan dengan baik. Terlebih terdapat banyak faktor yang menentukan ketepatan pelaksanaan anggaran, seperti tingkat kemampuan dalam menghadapi perubahan aspek ekonomi berikut dalam melaksanakannya. Adapun sistem pelaksanaannya diharuskan dapat berkemampuan dalam menjalankan pengawasan berikut pelaporan untuk dimungkinkan identifikasi atas permasalahan dalam pelaksanaan anggaran sekaligus pemberian jaminan ketaatan terhadap wewenang anggaran. Pelaksanaan anggaran tersebut bukan hanya dengan mengikuti prosedural saja, namun juga menjaga kepercayaan *stakeholder* seperti telah dijelaskan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

*“Pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan apa yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kita itu terus usaha untuk memberikan yang terbaik dan melibatkan masyarakat dalam tiap kegiatan yang akan dikerjakan juga memberi kesempatan untuk masyarakat memberi kritik dan saran untuk kegiatan yang dilakukan oleh dinas”* (Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Sebagaimana penjelasan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran pada Dinas Syariat Islam dengan merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang memuat secara rinci anggaran yang akan dilaksanakan berdasarkan program kegiatan Dinas Syariat Islam. Dalam upaya menjalankan yang terbaik dalam pelaksanaan anggarannya, dinas juga mendorong pelibatan masyarakat dalam kegiatan yang hendak dikerjakan sehingga anggaran yang dilaksanakan tidak mendapat masalah yang berdampak serius untuk menjaga kepercayaan berbagai pihak.

#### **d) Pengendalian**

Pengendalian anggaran dilangsungkan karena memiliki tujuan atas perencanaan dan implementasinya secara baik hingga kemudian bisa memenuhi tujuan ataupun target yang hendak diraih. Pengendalian anggaran begitu berperan penting dalam mendukung pemeriksaan kesalahan berikut penentuan tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terhadinya penyimpangan atas acuan yang berlaku dan memastikan bahwa tujuan institusi sudah berjalan secara baik. Pengendalian anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya yaitu dengan senantiasa mendorong pelibatan masyarakat pada setiap pelaksanaannya, hingga masyarakat dalam hal ini turut dimungkinkan mendukung pengawasan atas program kerja yang dijalankan secara langsung seperti pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya:

*“Pengendalian anggaran yang dilakukan pada Dinas Syariat Islam dilakukan dengan berusaha melibatkan komponen masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan juga memberi kesempatan untuk masyarakat pula mengambil peran dalam realisasi anggaran untuk menjaga kepercayaan berbagai pihak dan masyarakat itu sendiri”* (Junaidi Hamid, S.Sos.I, Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Dari pernyataan Sekretaris Dinas Syariat Islam ini dijelaskan bahwa melalui pelibatan aktif masyarakat secara terus menerus pada proses pelaksanaan dan

pengendalian anggaran dapat dinilai sebagai pilihan terbaik untuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah terkait penganggaran. Selain itu, dimungkinkan pula bagi Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya melalui adanya pelibatan Masyarakat ini untuk dapat menjalankan pengelolaan anggaran dengan jujur dan adil dalam rangka mendukung pengendalian anggaran dan meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan terkait pengelolaan anggaran hingga dapat semakin mendorong tercapainya tujuan institusi.

## **2. Model Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya**

Penganggaran adalah suatu kegiatan yang menelaah program prioritas yang nantinya akan berhubungan dengan jumlah alokasi dana. Dalam penerapannya, diperlukan implementasi aspek transparansi dan akuntabilitas agar tercapai ketepatan sasaran dan tujuan anggaran. Adapun untuk kedua komponen tersebut merupakan wujud tanggung jawab atas anggaran yang terkait dengan permasalahan akuntabilitas pemerintah secara efektif dan efisien yang bertujuan menunjang pemerintahan secara rasional dan sistematis pada proses pengelolaan anggaran. Berkenaan hal ini, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam penjelasannya menyiratkan bahwa akuntabilitas pada satuan kerja yang beliau pimpin telah dilaksanakan dengan baik. Dalam penuturannya :

*“Alhamdulillah selama ini akuntabilitas selalu kita jaga agar anggaran sesuai dengan koridor yang telah direncanakan, Dinas Syariat Islam setiap tahun juga melaporkan akuntabilitasnya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)” (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).*

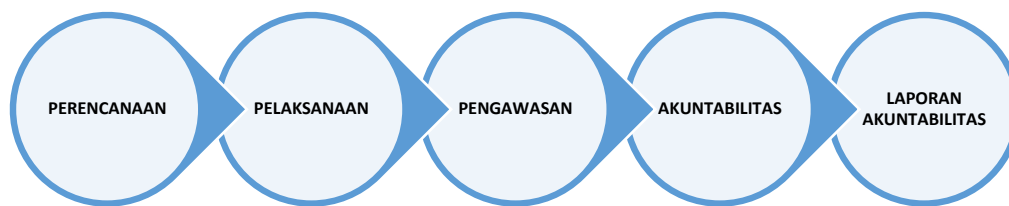
Sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Syariat Islam ini dapat digambarkan bahwa reformasi birokrasi pada Dinas Syariat Islam dapat dikatakan sudah cukup baik pelaksanaannya, hingga kemudian proses mengelola keuangan dalam satuan kerja terkait sudah sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkenaan terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran yang ada dalam Dinas Syariat Islam sendiri, dapat dikategorikan dalam beberapa tahapan sebagaimana diuraikan berikut ini :

### **a) Input**

Input merupakan bahan atau seluruh sumber daya yang termuat pada suatu proses tertentu, yang bisa berwujud dokumen, faktur, atau berbagai hal lain.

Pada dasarnya model akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan mempunyai ragam bentuk yang seharusnya disesuaikan dengan apa yang diprogramkan atau masing- masing bidang kegiatan dari satuan kerja instansi. Berbagai bentuk pertanggungjawaban itu mencakup keuangan program dan output dari institusi itu sendiri. Di dalam ruang lingkup birokrasi pemerintahan daerah dikenal istilah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rujukan tanggung jawab atas instansi pemerintah termasuk pemerintahan daerah. Adapun model akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dapat dilihat dari gambar di bawah ini :

Gambar 4.3 Model Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya



### b) Proses

Dijelaskan bahwa proses merupakan rangkaian aktivitas yang melalui perancangan untuk mengubah atau mengalokasikan suatu input agar dapat berubah sebagai output. Dalam praktiknya proses dilakukan dengan mengumpulkan berbagai bukti dari kegiatannya. Proses pada Dinas Syariat Islam dijelaskan melalui penjelasan Kepala Dinas Syariat Islam Kab. Pidie Jaya sebagai berikut :

Penjelasan yang disampaikan Kepala Dinas Syariat Islam Pidie Jaya ini sebagaimana pula dalam penjelasan *Sharia Enterprise Theory*. Sebagai Satuan Perangkat Daerah yang bersinggungan langsung dengan penerapan Syariat Islam, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sudah seharusnya bertanggung jawab secara masif pada dua komponen terkait untuk menjadi bagian atas implementasi amanah dari Allah SWT dan menjadi institusi yang bertanggungjawab menegakkan syariat Islam. Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui apa saja unsur pada proses terkait, yakni Dinas Syariat Islam tersebut berikut birokrasi pemerintahan daerah dan masyarakat lewat mekanisme musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan).

### c) Output dan Outcome

*Output* merupakan hasil yang secara langsung bisa diperlel melalui sebuah proses, sementara untuk *Outcome* merupakan dampak dalam jangka panjang atas adanya proses yang dilalui yang berwujud perubahan atau manfaat. Output pada akuntabilitas Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya merupakan sebuah Laporan Akuntabilitas dengan pembuatan sebagaimana acuan yang pemerintah tetapkan. Kendati dalam praktiknya terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat masalah seperti dijelaskan Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya :

Tabel 4.2 Akuntabilitas Anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

No.	Model Akuntabilitas dari sisi	Deskripsi
1.	Input	Input pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam akuntabilitas merupakan penghimpunan bukti-bukti transaksi keuangan yang selanjutnya diproses untuk menyusun laporan akuntabilitas.
2.	Proses	Proses akuntabilitas yang dilakukan dengan menyusun, mengklasifikasi, mengikhtisarkan,

		dan menyajikan bukti-bukti transaksi yang menjadi input dalam uraian laporan akuntabilitas.
3.	Output dan Outcome	Output yang dihasilkan adalah Laporan Akuntabilitas yang disusun, dan Outcome yang dihasilkan adalah pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang dialokasikan dan kepercayaan para stakeholder.

### 3. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dalam Perspektif *Maqashid Syariah* pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya

Adapun akuntabilitas berdasarkan perspektif islam termasuk sebagai kajian mengenai serangkaian norma positif yang mendiskusikan berkenaan dengan seperangkat nilai ketuhanan untuk mendapatkan Ridha Allah SWT dalam keseharian manusia. Sehingga dalam islam, akuntabilitas memiliki tujuan utama yang tidak hanya memfokuskan pada kehidupan duniawi, namun juga tetap berikhtiar dalam mencapai kehidupan ukhrawi yang memiliki nilai intrinsik jangka panjang. Akuntabilitas dalam perspektif islam memiliki karakteristik yang turut meliputi pembangunan masyarakat, keadilan dan kepedulian sosial pada organisasi, juga pemenuhan kesamaan hak menyatakan pemikiran antarelemennya

Penjelasan dari Sekretaris Dinas Syariat Islam ini menunjukkan bahwa akuntabilitas islam pada dasarnya sudah diterapkan di Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam kaitannya dengan keadilan sosial, pembangunan masyarakat, dan kesetaraan suara. Apabila hubungkan terhadap konsep *maqashid syariah*, bahwa yang telah dilaksanakan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sudah sesuai dengan tujuan utama *maqashid syariah* yang terbagi dalam lima bentuk tersebut.

#### a) *Hifz ad-din* (Memelihara Agama)

Dari hasil penelusuran peneliti terhadap penerapan *hifz ad-din* dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, terdapat beberapa program kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan memelihara agama, diantaranya :

- (1) Penyelenggaraan Pengajian di Gampong (Desa)
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
- (3) Penyebaran Informasi Keislaman
- (4) Penyelenggaraan Perayaan Hari Besar Islam

Namun berdasarkan temuan penelitian, anggaran yang diberikan kepada program kegiatan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan anggaran keseluruhan yang tersedia. Selain itu, Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya menerapkan *hifz ad-din* dengan menyediakan fasilitas tempat ibadah bagi pegawainya untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu serta memberikan waktu istirahat kepada pegawainya untuk dapat melaksanakan ibadah tepat waktu

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya juga mengimplementasikan perilaku-perilaku yang sesuai dengan tuntunan syariat islam agar tetap bisa mempertahankan konsistensi dalam melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi, serta pegawainya terus berusaha memelihara amanah dengan cara tetap menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyat dalam bentuk kewajiban menjaga akuntabilitas. Dari hal ini dapat tercerminkan bahwa amanah yang telah dijaga menunjukkan sifat kecerdasan (*fathanah*)

yang beriringan dengan pengamalan sifat (*shiddiq*) yang mana Dinas Syariat Islam memberitahukan kendala-kendala yang dihadapi secara transparan.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya sebagai bagian dari birokrasi dan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya menjadi instansi yang mengemban amanah dan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam konfirmasinya berusaha terus semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan dari seluruh pihak-pihak yang berkepentingan agar bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergitas positif guna bisa bertanggungjawab terhadap apa yang telah direncanakan dalam pengelolaan anggaran. Penjelasan ini sebagaimana yang didapat dari informasi Kasubbag. Keuangan Kabupaten Pidie Jaya selaku narasumber :

“Dalam menjaga akuntabilitas, dan kepercayaan para stakeholder, Dinas Syariat Islam itu berupaya untuk memberikan kinerja terbaik, memberi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran yang membangun dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, masyarakat akan terus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan anggaran” (Rahmati, S.E., Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag. Keuangan Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya ini relevan dengan Surat An-Nisa ayat 58, dan Al-Anfal ayat 27 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang ada harus berpegang pada kemaslahatan umat. Ayat di atas juga menunjukkan kepada kita dengan jelas agar senantiasa menjalankan amanah yang diberikan dan menjaganya sesuai dengan ajaran agama islam serta menjauhi segala larangan yang bisa menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Siapapun yang diberikan oleh Allah kedudukan dan wewenang untuk mengatur kesejahteraan masyarakat maka orang tersebut harus menjaga masyarakat dengan kebijakan yang baik agar semua kebutuhan dan kepentingan mereka dapat terpenuhi dengan layak sebagaimana terpenuhinya kepentingan dirinya sendiri.

Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya digambarkan sebagai sebuah keluarga yang ada dalam ruang lingkup Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang seharusnya saling mengingatkan dan menjaga agar tetap dalam jalur koridor nilai-nilai keislaman

sesuai dengan napa yang telah disebutkan dalam lima tujuan utama *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Implementasi konsep dari *maqashid syariah* ini sendiri dalam pengelolaan anggaran mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya, yang menyatakan :

“*Maqashid syariah* dalam pengelolaan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya tentunya sangat baik diterapkan disini ya, terlebih kami harus menjadi pelopor bagi dinas-dinas yang lain untuk menerapkan hal yang sama, apalagi kita ketahui bahwa Visi dari Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri menjadikan Pidie Jaya sebagai Kabupaten yang Islami, harapan kita apa yang sudah baik bisa terus dipertahankan, dan apa yang masih menjadi kekurangan dapat dievaluasi dan dibenahi sehingga tidak ada penyimpangan anggaran yang terjadi” (Drs. Jailani, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya).

Pernyataan dari Kepala Dinas Syariat Islam ini mengindikasikan bahwa penerapan *maqashid syariah* bisa menjadi *role model* bagi instansi atau organisasi lain dalam membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan yang baik. Berikut adalah tabel aktualisasi *maqashid syariah* dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan anggaran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya dalam perspektif *maqashid syariah* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah terkelola dengan baik melalui prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang melibatkan seluruh pihak yang berkaitan dengan program-program yang dianggarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya. Setiap melakukan penyusunan program kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya selalu mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan program apa saja yang akan dilakukan oleh instansi.
2. Model akuntabilitas anggaran pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya berfokus pada output dan outcome yang diperoleh, dimulai dari input yang berupa bukti-bukti transaksi keuangan maupun dokumentasi kegiatan yang selanjutnya diproses untuk menyusun laporan akuntabilitas. Proses akuntabilitas yang dilakukan dengan menyusun, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan menyajikan bukti-bukti transaksi yang menjadi input dalam uraian laporan akuntabilitas. Output yang dihasilkan adalah Laporan Akuntabilitas yang disusun, dan Outcome yang dihasilkan adalah kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang dialokasikan dan kepercayaan para stakeholder. Namun pada praktiknya terkadang terdapat kendala pada keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban karena adanya dokumen yang tidak lengkap dari bidang-bidang atau dari para *stakeholder* yang lain.
3. Secara umum akuntabilitas anggaran yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi lima tujuan dalam konsep *maqashid syariah* yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nas*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, dan *hifdz an-*



*nasb.* Hanya saja, Dinas Syariat Islam perlu melakukan evaluasi sebagai perbaikan ke depan dalam pengalokasian anggaran pada program-program atau kegiatan-kegiatan yang mempunyai urgensi lebih dibanding dengan program kegiatan lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agnesia, Inge, M Ridwan, and Maryam Batubara, 'BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING', 6, 17–26

Akbar, Dendy Syaiful, and Ruhayat, 'Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah', *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3 (2016), 93–106

Asmarani, Marlia, and Rohmawati Kusumaningtias, 'AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH : STUDI PADA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH SURABAYA Marlia Asmarani Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi , Universitas Negeri Surabaya Rohmawati Kusumaningt', *AKUNESA Jurnal Akuntansi Unesa*, 8 (2019)

Hakimi, A. R., 'Accountability Of The Afghan Government From Maqasid Perspective: Five Necessities Of Human Survival', *Doctoral Dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1 (2022), 53–55

- Hariyadi, Hariyadi, 'BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) BERBASIS KINERJA (Studi Empiris Di SMK Negeri Se-Kota Madiun)', *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4 (2015), 1  
<<https://doi.org/10.25273/jap.v4i1.669>>
- Kamaluddin, Santrio, 'Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang', *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3 (2019), 222–28  
<<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>>
- M. Nafarin., *Penganggaran Perusahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2018)
- Makalew, Nengsi Oktavia, Paulus Kombo Allo Layuk, and Ida Ayu Purba Riani, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja Berbasis Kinerja Di Pemerintah Provinsi Papua Barat', *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 6 (2021), 1–9  
<<https://doi.org/10.52062/keuda.v6i1.1666>>
- Melo, P N, A Martins, and M Pereira, 'The Relationship Between Leadership and Accountability: A Review and Synthesis of the Research', *Journal of Entrepreneurship Education*, 23 (2020)
- Padli, M. Syaiful, Nur Diana, and Afifudin, 'Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Bank Syariah Di Indonesia', *E-Jra*, 07 (2019), 119–31
- Paramitha Sari, Desak Made Indah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bos Pada Slb Negeri 2 Denpasar', *Jurnal Akuntansi*, 11 (2022), 103–17 <<https://doi.org/10.37932/ja.v11i1.440>>
- Pirngadi, Rsud, Kota Medan, Azhari Akmal Tarigan, and Syukri Albani Nasution, 'Pengaruh Kompensasi, Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Variabel Intervening Kepuasan Kerja Dan Perspektif Maqashid Syariah Pada', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (2022), 2995–3002
- Ramadhan, Mohammad Iqbal Bagus, Ahim Abdurahim, and Hafiez Sofyani, 'Modal Intelektual Dan Kinerja Maqashid', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6 (2018), 5–18
- Rivan, Arif, and Maksun I, 'Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Application of Village Financial System in Village Financial Management', *Public Administration Journal*, 9 (2019), 92–100  
<<http://dx.doi.org/10.31289/jap.v9i2.2487><http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>>
- Sayuti, Husaenie & Hidayati, Aisyah, 'Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat', *Jurnal RESIPROKAL*, 2 (2020)
- Sayuti, Sayuti, Jamaluddin Majid, and Muhammad Sapril Sardi Juardi, 'Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan)', *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1 (2018), 16–28  
<<https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>>

Sofyani, H, UNNA Ali, and D Septiari, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)', *JIA (Jurnal Ilmiah ...*, 5 (2020), 325–59

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2017)